

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan, diperlukan sinergi dari beberapa pihak baik dari pemerintah, sektor swasta, dan yang paling penting masyarakat sebagai bagian dari pelaku utama dalam sektor pariwisata di daerahnya.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, baik secara fisik maupun melalui pemahaman peran mereka dalam proses pengembangan. Pemahaman peran masyarakat dalam pengembangan wisata mencerminkan keselarasan cara pandang dan tindakan kolektif terhadap potensi wisata. Kesamaan persepsi ini mendorong terbentuknya aksi bersama yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata sebagai bentuk pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Herdiana, 2019).

Namun demikian, berbagai dokumen strategis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi tantangan. Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 mengidentifikasi,

pengembangan destinasi wisata di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi potensi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional. Permasalahan yang dihadapi yaitu 1) perubahan iklim dan bencana alam, 2) konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal, 3) kesiapan masyarakat lokal belum optimal, dan 4) kemudahan investasi di sektor pariwisata belum optimal. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi penting untuk mengatasi tantangan tersebut, khususnya dalam meningkatkan kesiapan masyarakat lokal.

Salah satu daerah yang berupaya mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan adalah Kabupaten Banjarnegara. Dengan motto “*The Heart of Central Java*”, Banjarnegara menjadi salah satu daerah yang mendukung potensi wisata di Provinsi Jawa Tengah (Fauzia et al., 2023). Namun demikian, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026, sektor pariwisata masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain 1) pengelolaan destinasi yang belum optimal dan minimnya pengembangan wisata baru, 2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, 3) rendahnya kualitas pelaku usaha dan jasa pariwisata, dan 4) lemahnya promosi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai strategi dalam meningkatkan potensi wisata daerah salah satunya dengan pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan bentuk pariwisata berbasis peran aktif masyarakat lokal yang dikembangkan secara partisipatif, di mana

inisiatif, pengelolaan, dan manfaat sepenuhnya melibatkan serta diperuntukkan bagi masyarakat setempat (Ani Wijayanti & Yitno Purwoko, 2022). Keberlanjutan pembangunan desa wisata sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan proses pengembangannya (Aini et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa prinsip partisipasi menjadi asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kepala desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan desa wisata diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, yang menegaskan bahwa desa wisata memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan usaha, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Peraturan ini menekankan pentingnya kemandirian desa wisata melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan wisata berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pengembangan tersebut, Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa desa wisata yang menawarkan daya tarik khas, baik dari segi keindahan alam, budaya, maupun potensi ekonomi kreatif masyarakat setempat. Berikut adalah tabel Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara beserta kategorinya.

No	Desa Wisata	Kategori	Tahun
1.	Desa Dieng Kulon	Maju	2008
2.	Desa Dawuhan	Berkembang	2017
3.	Desa Pagak	Berkembang	2017
4.	Desa Pekasiran	Rintisan	2015
5.	Desa Blambangan	Rintisan	2017
6.	Desa Gentansari	Rintisan	2017
7.	Desa Kepakisan	Rintisan	2017
8.	Desa Padepokan	Rintisan	2017
9.	Desa Pesangkalan	Rintisan	2018
10.	Desa Rakitan	Rintisan	2018
11.	Desa Winong	Rintisan	2017
12.	Desa Gumelem	Rintisan	2021

Tabel 1.1 Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara
Sumber : Jadesta Kemenparekraf, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Desa Wisata Pagak termasuk dalam kategori berkembang di Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah daerah menetapkan Desa Wisata Pagak melalui Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 556/111/2022. Penetapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata Desa Pagak sebagai destinasi unggulan yang mengedepankan kearifan lokal, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Adanya kategori berkembang membawa harapan agar masyarakat setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam proses pengembangan desa wisata.

Untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Pangemanan, 2017). Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa, berupa swadaya dan gotong-royong, sehingga seluruh masyarakat turut merasakan dan memikul tanggung jawab pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara

hasil pembangunan agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang (Maharany, Hasrul, Al Rafni, 2024).

Desa Wisata Pagak merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banjarnegara yang menawarkan beragam pengalaman menarik bagi para pengunjung. Desa Wisata Pagak meraih prestasi dalam ajang Gelar Desa Wisata tahun 2024 sebagai juara 1 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berkat keanekaragaman potensi wisata alam, budaya, kuliner, dan wisata buatan yang ditawarkan (Anis, 2025).

Daya tarik yang dimiliki Desa Wisata Pagak tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan pelestarian budaya melalui berbagai jenis wisata yang khas. Salah satu destinasi unggulan yang dimiliki oleh desa ini yaitu Rawa Lutung Park berupa kolam renang. Selain itu, Desa Wisata Pagak juga memiliki paket wisata jelajah desa yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Sejalan dengan kajian Hardani et al., (2019), Desa Pagak memiliki beragam potensi, namun masyarakat belum mampu memanfaatkan potensi dan teknologi dalam pengembangan wisata edukasi. Berikut adalah tabel jumlah wisatawan Desa Wisata Pagak.

Tahun	Jenis Wisata	
	Rawa Lutung Park	Jelajah Desa
2020	15.592	-
2021	25.977	-
2022	46.111	-
2023	46.986	-
2024	135.062	14

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Desa Wisata Pagak
Sumber : BUMDES Astagina Desa Pagak

Berdasarkan Tabel 1.2, destinasi Rawa Lutung Park menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Di sisi lain, jumlah partisipasi wisatawan dalam paket jelajah desa masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh BUMDes Astagina yaitu 50 paket wisata 1 Day Tour dan 20 paket Live In setiap bulan. Kajian Priyanto et al. (2024) mengindikasikan bahwa tantangan dalam pengembangan Desa Wisata Pagak berkaitan dengan aspek kapasitas masyarakat, khususnya dalam pengelolaan wisata secara profesional dan penyusunan paket wisata yang menarik.

Berdasarkan temuan Priyanto et al. (2024), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menegaskan bahwa keberlanjutan desa wisata budaya di Desa Pagak sangat bergantung pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak utama kegiatan pariwisata. Namun, peran pokdarwis belum dapat dijalankan secara optimal karena tingkat kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk membuka diri, beradaptasi, dan terlibat dalam pengelolaan desa wisata budaya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata belum berlangsung secara menyeluruh.

Beberapa studi sebelumnya turut mengidentifikasi kendala pengembangan Desa Wisata Pagak. Hardani et al. (2019) menjelaskan bahwa pengembangan Desa Wisata Pagak masih menghadapi keterbatasan pendanaan. Keterbatasan ini membuat inisiatif masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan layanan wisata sangat bergantung pada bantuan eksternal. Kapasitas lokal, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya, masih berada pada tahap pengembangan sehingga proses penyelenggaraan wisata belum dapat berlangsung secara mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Pagak tahun 2024 menghasilkan sejumlah usulan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Pagak. Usulan berasal dari semua dusun yang ada di Desa Pagak yaitu 4 dusun yang terdiri dari Dusun Banjaranyar, Banjardawa, Depok, dan Jatimaya, yang menyoroti percepatan penyelesaian sarana dan prasarana wisata, seperti pembangunan lapangan wisata dan gerbang masuk di Dusun Banjaranyar. Di bidang seni dan budaya, masyarakat mengusulkan bantuan alat untuk kelompok kesenian lokal serta pelaksanaan Festival Suran Desa Pagak. Keseluruhan usulan ini mencerminkan prioritas desa terhadap pengembangan pariwisata melalui pendekatan fisik, sosial, dan budaya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut dapat ditinjau lebih lanjut melalui tingkat kehadiran masyarakat pada Musrenbang Desa Pagak pada tahun 2024. Berikut data kehadiran peserta Musrenbang disajikan pada tabel berikut.

Kehadiran Masyarakat Berdasarkan Jabatan	Jumlah
Ketua RT	3
Masyarakat	10
BPD	6
Perangkat Desa	8
Kepala Dusun	2
Bintara Pembina Desa	2
Puskesmas Klampok	2
Staf Kecamatan	2
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
Lembaga Perencanaan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat	2
Pendamping Lokal Desa	1
Jumlah	39

Tabel 1. 3 Kehadiran Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2024

Sumber : Pemerintah Desa Pagak, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Pagak tahun 2024 masih didominasi oleh peserta dari kalangan struktural atau pemangku jabatan formal. Dari total 39 peserta, hanya 10 orang berasal dari masyarakat umum. Jika dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga di Desa Pagak menurut website *sidesa.jatengprov.go.id* yang mencapai 1.150, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut masih tergolong rendah secara proporsional.

Hal ini diperkuat dengan isu strategis dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwareja Klampok tahun 2024, yang mengidentifikasi adanya tantangan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, di antaranya munculnya sikap apatis akibat persepsi bahwa forum ini hanya bersifat formalitas administratif. Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya dominasi unsur struktural dan belum optimalnya ruang partisipasi bagi kelompok perempuan dan pemuda turut memperkuat kondisi tersebut. Aspirasi yang muncul dalam forum juga lebih banyak bersifat keinginan, bukan hasil dari identifikasi kebutuhan secara partisipatif. Penelitian Firmansyah et al. (2023) memperkuat kondisi ini, dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang di sejumlah desa masih bersifat simbolis dan pasif, di mana masyarakat hanya hadir sebagai peserta formal tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, data dari website *sidesa.jatengprov.go.id*, struktur demografi Desa Pagak didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini semestinya menjadi modal sosial yang kuat bagi Pokdarwis Krida Wisata untuk lebih aktif merancang dan mengimplementasikan program pengembangan desa

wisata. Namun demikian, potensi demografis yang dimiliki oleh kelompok usia produktif di Desa Pagak belum dioptimalkan dalam pengembangan desa wisata. Penelitian Hardani et al. (2019) menjelaskan bahwa strategi promosi dan daya tarik untuk menarik wisatawan yang dilakukan Desa Wisata Pagak belum optimal. Ketiadaan pembaruan konten serta lemahnya upaya pemasaran digital menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat usia produktif masih belum dimanfaatkan oleh pengelola desa wisata.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dibutuhkan adanya kajian mengenai arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak. Permasalahan untuk memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam pengembangan desa wisata, baik dalam arena perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, maupun keterlibatan mereka dalam evaluasi program yang dijalankan. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dinamika partisipasi tersebut secara menyeluruh.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang masih menghambat pelaksanaannya, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penjualan paket Jelajah Desa (tabel 1.2) belum mencapai target yang ditetapkan BUMDes
2. Hasil penelitian Priyanto et.al (2024), mengidentifikasi:

- a. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan penyusunan paket.
 - b. Peran Pokdarwis belum optimal dalam menggerakkan kegiatan desa wisata.
 - c. Kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata masih rendah.
3. Penelitian Hardani et al. (2019), mengidentifikasi
- a. Masyarakat belum mampu memanfaatkan potensi dan teknologi dalam pengembangan wisata edukasi.
 - b. Keterbatasan pendanaan dalam pengembangan Desa Wisata Pagak.
 - c. Strategi promosi dan daya tarik wisata Desa Pagak belum dimaksimalkan.
4. Partisipasi dalam Musrenbang berdasarkan tabel 1.3 didominasi unsur struktural.

1.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang serta hasil identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Pagak Kabupaten Banjarnegara?

2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak Kabupaten Banjarnegara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak Kabupaten Banjarnegara ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Pagak Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak Kabupaten Banjarnegara.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian lain dan dijadikan acuan untuk studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dalam merumuskan strategi pengembangan desa wisata. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam arena evaluasi dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk lebih aktif berperan serta dalam arena pengembangan Desa Wisata Pagak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak lagi bersikap apatis terhadap kemajuan sektor pariwisata di daerah mereka.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Landasan Teori	Kontribusi terhadap Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian
1.	Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, dan Surati, tahun 2018 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo (Akbar et al., 2018)	Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.	Partisipasi masyarakat di Desa Jatimulya dipengaruhi secara dominan oleh kualitas kepemimpinan kepala desa, intensitas komunikasi antara aparat desa dan warga, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan minimnya pemahaman warga terhadap pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan.	Tjokroamidjojo (2005) yang menyebut bahwa partisipasi dipengaruhi oleh 1. kepemimpinan, 2. komunikasi, dan 3. pendidikan	Memperkuat argumen bahwa partisipasi tidak hanya tergantung pada program, tetapi juga pada kapasitas masyarakat dan komunikasi dengan pemerintah desa	Persamaan: mengkaji partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan di tingkat desa, serta menyoroti pentingnya faktor kepemimpinan, pendidikan, dan komunikasi sebagai penentu tingkat partisipasi. Perbedaan: Fokus penelitian pada aspek perencanaan pembangunan secara umum, bukan pada sektor pariwisata atau pengembangan desa wisata secara spesifik sebagaimana dalam penelitian yang akan dilakukan.

2.	Luce Dwi Nanda, Firwan Tan, dan Melinda Noer, tahun 2018 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyelamatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Danau Maninjau. (Nanda et al., 2018)	Mengkaji sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Save Maninjau masih tergolong rendah. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat berada pada level “informing”; pada tahap pelaksanaan, berada di tingkat “consultation”; dan pada tahap monitoring serta evaluasi hanya mencapai tingkat “therapy”. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi meliputi keterbatasan lahan, pendidikan yang rendah, ketergantungan pada keramba, kurangnya pengetahuan dan komitmen masyarakat,	Partisipasi menurut Arnstein (1969), 1. Manipulasi 2. Terapi 3. Informasi 4. Konsultasi 5. Pemberian Suara 6. Kemitraan 7. Kekuasaan Delegasi 8. Kontrol Warga	Memberi contoh bahwa keterbatasan pendidikan, lapangan kerja, dan ketergantungan ekonomi dapat menghambat partisipasi, sejalan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi dalam Desa Pagak.	Persamaan: Mengkaji keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan berbasis lokal Perbedaan: Pendekatan teoritis menggunakan tipologi Arnstein, berbeda dari penelitian ini yang menggunakan teori Cohen dan Uphoff.
----	--	--	---	--	--	---

			serta lemahnya koordinasi dan ketegasan pemerintah.			
3.	Dickky Divani Tri Yudistira, Margono, dan Abd. Mu'id Aris Shofa, tahun 2023 Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Objek Wisata Hutan Bambu di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro (Divani et al., 2023)	Mengetahui bagaimana proses terbentuknya Objek Wisata Hutan Bambu di Desa Sumbermujur, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi.	Masyarakat aktif berpartisipasi dalam lima bentuk: pemikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan sosial. Dampak positif berupa peningkatan ekonomi lokal, namun tantangan tetap ada dalam mempertahankan partisipasi berkelanjutan.	Partisipasi masyarakat menurut Huraerah (2008), yang mengklasifikasikan partisipasi dalam bentuk 1. pemikiran, 2. tenaga, 3. harta benda, 4. keterampilan, dan 5. sosial.	Memberi gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat desa secara aktif terlibat dalam pengelolaan wisata melalui bentuk partisipasi pemikiran, tenaga, keterampilan, dan sosial.	Persamaan: meneliti bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata berbasis desa Perbedaan: Fokus kajian terbatas pada bentuk partisipasi, tidak membahas faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi secara teoritis.

4.	I Gede Wiramatika, I Nyoman Sunarta, dan I Putu Anom, tahun 2021 Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Batur di Kintamani Kabupaten Bangli (Wiramatika et al., 2021)	Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat lokal, hambatan yang dihadapi, dan upaya pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata Geopark Batur.	Partisipasi aktif dalam pelestarian dan pelayanan wisata, namun rendah dalam pengambilan keputusan. Hambatan utama: lemahnya koordinasi pemerintah, rendahnya literasi masyarakat, dan pelanggaran kawasan lindung oleh swasta.	Partisipasi menurut Arnstein (1969), 1. Manipulasi 2. Terapi 3 Informasi 4. Konsultasi 5. Pemberian Suara 6. Kemitraan 7. Kekuasaan Delegasi 8. Kontrol Warga	Menunjukkan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat lokal dan penggunaan Community-Based Tourism sebagai kerangka pengembangan.	Persamaan: menyoroti peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Perbedaan: Lokus penelitian berada pada kawasan geopark yang berskala internasional, berbeda dari fokus lokal desa wisata Pagak.
5.	Dedy Hermawan dan Simon S. Hutagalung, Tahun 2021	Mengidentifikasi dan mengkategorikan bentuk partisipasi masyarakat dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata umumnya tinggi ketika mereka	Verhagen (1980), Oakley & Programme (1991), dan Cohen & Uphoff (1980), yang membagi partisipasi	Memahami dinamika partisipasi di Pagak yang tampak belum sepenuhnya tumbuh secara mandiri (contoh: dominasi Pokdarwis dan belum optimalnya peran	Persamaan: menelaah dimensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.

	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata di Lampung Selatan (Hutagalung & Hermawan, 2021)	pengelolaan pariwisata serta menyusun faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat keberhasilan partisipasi tersebut di wilayah Lampung Selatan.	dimobilisasi atau diminta secara aktif oleh pihak pengelola. Namun, partisipasi menjadi lebih rendah ketika bergantung pada inisiatif sendiri, terutama dalam bentuk tenaga dan materiil. Faktor yang mendorong partisipasi mencakup adanya kemauan, kapasitas, dan kesempatan, sedangkan penghambatnya antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, kesibukan pekerjaan, perbedaan budaya, dan kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan wisata.	menjadi tiga dimensi utama: 1. pemikiran, 2. tenaga, dan 3. materi.	warga dalam menyusun paket wisata)	Perbedaan: Menggunakan pendekatan klasifikasi partisipasi berdasarkan karakter mobilisasi, bukan pada struktur proses partisipasi seperti dalam kerangka Cohen dan Uphoff.
6.	Lis Hafrida, Hildawati, Yulianda Sari, Meri Yanti, dan	Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam	Partisipasi tergolong “cukup baik”, paling tinggi pada pelaksanaan. Masih rendah dalam	Teori dari Yadav (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013), yang menyatakan	Penelitian ini memperkuat dimensi partisipasi berdasarkan Cohen & Uphoff, khususnya dalam	Persamaan: membahas partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan pembangunan.

	Dedy Afrizal, tahun 2023 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih (Hafrida et al., 2023)	pembangunan infrastruktur serta faktor pendukung dan penghambatnya.	pengambilan keputusan dan evaluasi. Hambatan utamanya: kurangnya minat masyarakat dan rendahnya kesadaran untuk menjaga hasil pembangunan.	bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat melalui empat tahap, yaitu: 1. partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2. pelaksanaan kegiatan, 3. pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4. pemanfaatan hasil pembangunan	pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan. Data kuantitatif yang digunakan juga dapat menjadi referensi untuk mengembangkan indikator pada setiap dimensi partisipasi.	Perbedaan: Lokus di kelurahan dan fokus pada infrastruktur, bukan desa wisata.
7.	Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, dan	Menganalisis bagaimana transformasi digital dapat	Digitalisasi mendorong partisipasi lebih aktif melalui media digital. Tantangan utama:	Partisipasi Masyarakat menurut (Amirkhanyan et al., 2019;	Penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat memperkuat partisipasi	Persamaan: menekankan pentingnya komunikasi dalam mendukung partisipasi masyarakat.

	Muhammad Faisal, tahun 2024 Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif (Jumalia Mannayong et al., 2024)	meningkatkan keterlibatan publik dalam proses kebijakan di sektor publik.	literasi digital rendah, keterbatasan akses, dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Diperlukan kebijakan inklusif dan peningkatan kapasitas masyarakat.	Morrissey, 2000);, yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam: 1. proses pengambilan keputusan dan 2. pelaksanaan kebijakan publik	masyarakat melalui media sosial, aplikasi seluler, dan forum daring. Temuan ini berguna sebagai alternatif strategi pemberdayaan partisipatif dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis digital.	Perbedaan: Fokus pada teknologi digital, bukan pembangunan fisik atau wisata.
8.	Arif Hermanto dan Febri Yuliani, tahun 2021 Partisipasi Masyarakat Peduli Api Desa Kesuma dalam Penanggulangan	Mengetahui partisipasi Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta faktor	Partisipasi melalui MPA efektif menurunkan jumlah kebakaran dari 21 kasus (2019) menjadi 5 kasus (2020). Masyarakat terlibat dalam patroli, sosialisasi, dan pemadaman. Hambatan: motivasi rendah, kekurangan	Konsep partisipasi menurut Isbandi (2007), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keikutsertaan dalam 1. identifikasi masalah,	Menunjukkan pentingnya faktor internal seperti motivasi, pendidikan, dan kesiapan masyarakat, serta hambatan berupa keterbatasan SDM dan sarana pendukung.	Persamaan: membahas pengaruh motivasi dan kapasitas masyarakat terhadap partisipasi. Perbedaan: Lokus di desa rawan bencana dengan fokus penanggulangan karhutla.

	gan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Hermanto & Yuliani, 2021)	penghambat nya.	SDM, minimnya anggaran dan sarana.	2. pengambilan keputusan, 3. pelaksanaan solusi, dan 4. evaluasi.		
9.	Joko Pramono dan Joko Suranto, tahun 2021 Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kota Surakarta (Pramono & Suranto, 2021)	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam kegiatan manajemen bencana, khususnya pada tahapan pra-bencana, penanganan bencana,	Partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana di Kota Surakarta masih belum optimal, terutama pada tahap pra dan pasca-bencana, karena rendahnya kesadaran, tidak adanya sanksi tegas, dan kurangnya wadah kolaborasi dengan pemerintah. Namun, saat terjadi bencana, partisipasi masyarakat cukup tinggi berkat semangat gotong royong dalam evakuasi, penyelamatan, dan penyediaan posko darurat.	Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep partisipasi masyarakat menurut Ach. Wazir Ws. et al. (1999) dan Isbandi (2007), yang mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam 1. pengambilan keputusan, 2. pelaksanaan, dan	Relevan dalam membahas kurang optimalnya partisipasi pada tahap perencanaan dan pasca kegiatan, yang sejalan dengan dimensi Cohen & Uphoff. Selain itu, jurnal ini juga menyinggung faktor eksternal, yaitu belum adanya forum resmi atau kepemimpinan kolaboratif sebagai penggerak partisipasi	Persamaan: menyoroti perlunya partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Perbedaan: Lokasi penelitian di wilayah perkotaan dan fokus pada bencana, bukan wisata.

		dan pasca-bencana.		3. evaluasi terhadap berbagai kegiatan sosial.		
10	Rofi Irawan, Sudarman Mersa, dan Joko Mulyono, tahun 2018 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam Pembangunan (Irawan et al., 2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan fisik di Desa Negara Nabung.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa masih rendah, terutama karena kurangnya kepedulian, kesadaran, dan inisiatif. Proyek seperti perbaikan air bersih dan infrastruktur pertanian kurang berjalan baik. Meski ada dukungan pemerintah desa dan rasa keterikatan, partisipasi belum merata di semua lapisan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan demi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.	Davis & Newstrom (2005) yang menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok untuk berkontribusi terhadap tujuan bersama dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.	Penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai faktor internal, seperti rendahnya rasa kepemilikan, semangat gotong royong, dan keinginan pribadi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Aspek ini memperkuat dimensi keinginan dalam diri masyarakat dan pendidikan	Persamaan: menunjukkan bahwa rendahnya rasa memiliki menghambat partisipasi masyarakat. Perbedaan: Fokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan irigasi, bukan sektor pariwisata.

11	Yi Liu, Jing Wang, Kaixuan Huang, Yuan (William) Li, dan Lisa C. Wan, tahun 2025 <i>The Sustainable Paradox of Community Tourism in World Cultural Heritage Villages: The Case of Xidi and Hong</i> (Liu et al., 2025)	Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, khususnya mengkaji mengapa tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang tinggi tidak selalu menghasilkan pariwisata yang	Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks, yaitu Desa Xidi yang menerapkan partisipasi masyarakat tinggi justru mengalami stagnasi pengembangan pariwisata, sedangkan Desa Hong yang melibatkan aktor eksternal dengan partisipasi masyarakat relatif lebih rendah berhasil mencapai peningkatan industri pariwisata. Keberlanjutan pariwisata dipengaruhi oleh kemampuan melakukan industrial upgrading dan proses pembelajaran, bukan semata-mata tingkat partisipasi masyarakat.	Menurut Hess (2004), embeddedness terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu territorial embeddedness yang berkaitan dengan keterikatan aktivitas pariwisata pada wilayah dan sumber daya lokal, societal embeddedness yang mencerminkan pengaruh nilai dan norma sosial masyarakat, serta network embeddedness yang berkaitan dengan keterhubungan masyarakat dengan jejaring	Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat perlu dianalisis berdasarkan arena dan konteksnya. Temuan ini memperkuat penelitian saya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak perlu dilihat secara spesifik pada arena pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan, serta tidak hanya diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata serta perhatian pada peran masyarakat lokal. Perbedaannya, penelitian Liu et al. menekankan paradoks partisipasi dan keberlanjutan dengan pendekatan embeddedness dan industrial upgrading pada desa warisan budaya di China, sedangkan penelitian saya menganalisis arena partisipasi masyarakat dalam konteks desa wisata lokal di Indonesia dengan pendekatan partisipasi masyarakat secara deskriptif kualitatif.
----	--	---	---	---	--	--

		berkelanjutannya di Desa Xidi dan Hong.		aktor dan sumber daya eksternal.		
12	Shize Zhang, tahun 2025 The Willingness–Capability Model: Reframing Local Participation in a Tourism Economy (Zhang, 2026)	Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual baru untuk memahami partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata dengan melihat interaksi antara kemauan (willingness) dan kemampuan substantif (capability) masyarakat, serta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak bersifat homogen, melainkan terbagi ke dalam empat posisi: (1) kemauan tinggi–kemampuan tinggi, (2) kemauan tinggi–kemampuan rendah, (3) kemauan rendah–kemampuan tinggi, dan (4) kemauan rendah–kemampuan rendah. Perpindahan antarposisi dapat terjadi seiring perubahan kondisi ekonomi, regulasi, dan nilai sosial. Dengan demikian, rendahnya partisipasi tidak selalu	Penelitian ini berlandaskan pada Capability Approach dari Amartya Sen (1999) yang menekankan kebebasan substantif individu, serta kritik terhadap model partisipasi normatif seperti Arnstein dan Tosun. Model Willingness–Capability dikembangkan sebagai kerangka interpretatif untuk melihat partisipasi sebagai proses relasional antara agensi individu	Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan keikutsertaan formal dalam arena tertentu, tetapi juga dengan mempertimbangkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam setiap arena partisipasi. Hal ini memperkaya analisis arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak.	Persamaan terletak pada fokus kajian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika partisipasi. Perbedaannya, penelitian Zhang menawarkan model konseptual Willingness–Capability dan menekankan dinamika individual, sedangkan penelitian saya menganalisis arena partisipasi masyarakat secara spesifik dalam konteks kelembagaan desa wisata dan tahapan pengembangan pariwisata di Desa Pagak.

		menjelaskan mengapa partisipasi bersifat beragam, dinamis, dan tidak selalu meningkat seiring peluang pariwisata.	disebabkan oleh ketidakmampuan, tetapi juga dapat berupa pilihan sadar atau penolakan strategis.	dan struktur sosial.		
13	Felix G. Bello, Brent Lovelock, dan Neil Carr, tahun 2018 <i>Enhancing Community Participation in Tourism Planning Associated with Protected Areas in</i>	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi konkret yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata masih terbatas dan bersifat konsultatif. Penelitian ini mengidentifikasi enam strategi utama untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, yaitu: (1) peningkatan kesadaran dan pendidikan publik,	Menurut Murphy (1985), partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata merupakan prasyarat utama keberhasilan pariwisata berbasis komunitas. Partisipasi tersebut tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam	Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat sering kali disebabkan oleh kelemahan struktural dan kelembagaan. Temuan ini memperkuat analisis bahwa arena partisipasi masyarakat di Desa Wisata Pagak, khususnya pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan,	Persamaan terletak pada fokus kajian partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata serta penggunaan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian Bello et al. berfokus pada kawasan lindung dan strategi peningkatan partisipasi secara normatif, sedangkan penelitian saya menganalisis arena partisipasi masyarakat secara empiris dalam konteks desa wisata dan kelembagaan desa di Indonesia.

	<i>Developing Countries</i> (Bello et al., 2018)	khususnya di kawasan konservasi pada negara berkembang, dengan studi kasus di kawasan lindung di Malawi.	(2) penguatan kapasitas masyarakat dan institusi, (3) penciptaan keterkaitan ekonomi lokal, (4) penggunaan metode partisipasi yang tepat, (5) pelibatan organisasi masyarakat lokal, dan (6) desentralisasi serta koordinasi kelembagaan.	proses perencanaan, akses terhadap informasi, tumbuhnya rasa memiliki terhadap kegiatan pariwisata, dukungan sosial masyarakat, serta pemerataan manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat lokal.	membutuhkan dukungan kapasitas dan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif.	
14	Mingsen Wang, Jinbo Jiang, Songjun Xu, dan Yi Guo, tahun 2021 Community Participation and Residents' Support for Tourism	Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif	Emerson (1976), Homans (1958), menjelaskan bahwa Social Exchange Theory (SET): hubungan antara partisipasi masyarakat, persepsi konflik, dan dukungan masyarakat terhadap	Penelitian ini memperkuat argumen bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berpengaruh langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui persepsi konflik. Temuan ini relevan untuk penelitian saya karena menunjukkan bahwa arena partisipasi masyarakat yang lemah	Persamaan: Penelitian Wang et al. (2021) dan penelitian ini sama-sama mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata serta menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menentukan keberlanjutan pengembangan pariwisata di tingkat lokal. Perbedaan

	Development in Ancient Villages: The Mediating Role of Perceptions of Conflicts in the Tourism Community (Wang et al., 2021)	gan pariwisata, dengan persepsi konflik dalam komunitas pariwisata sebagai variabel mediasi pada desa wisata bersejarah (ancient village).	terhadap persepsi konflik. 3. Persepsi konflik berpengaruh negatif terhadap dukungan masyarakat. 4. Persepsi konflik memediasi hubungan antara partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat.	pengembangan pariwisata.	dapat memicu konflik dan menurunkan dukungan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak.	Penelitian Wang et al. (2021) menitikberatkan pada hubungan antara partisipasi masyarakat, persepsi konflik, dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis arena partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengembangan Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara.
--	---	---	---	---------------------------------	--	--

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah menjadi konsep sentral dalam kajian pembangunan dan pariwisata. Namun, sebagian besar penelitian masih memosisikan partisipasi secara normatif, yakni sebagai sesuatu yang ideal, semakin tinggi semakin baik. Penelitian-penelitian dalam konteks pembangunan desa dan kebijakan publik, seperti yang dilakukan oleh Muh. Firyal Akbar dkk., Lis Hafrida dkk., Rofi Irawan dkk., serta Jumalia Mannayong dkk., umumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan dibandingkan tahap pengambilan keputusan dan evaluasi. Pola ini memperlihatkan bahwa partisipasi sering kali bersifat administratif dan instrumental, di mana masyarakat dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan program, tetapi belum sepenuhnya diberi ruang dalam menentukan arah dan kontrol pembangunan.

Dalam kajian pariwisata desa, penelitian oleh Dickky Divani Tri Yudistira dkk., I Gede Wiramatika dkk., serta Dedy Hermawan dan Simon S. Hutagalung juga menunjukkan kecenderungan serupa. Masyarakat lokal cenderung terlibat dalam aktivitas operasional dan pemanfaatan ekonomi, sementara perencanaan dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah atau aktor eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata desa sering kali dipahami sebagai keterlibatan praktis, bukan sebagai proses penguatan posisi masyarakat dalam struktur pengambilan keputusan.

Sejumlah penelitian mencoba mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan tipologi partisipasi normatif, terutama tangga partisipasi Arnstein,

seperti yang dilakukan oleh Luce Dwi Nanda dkk. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, namun cenderung menyederhanakan dinamika partisipasi dengan mengasumsikan bahwa partisipasi ideal adalah ketika masyarakat berada pada tingkat tertinggi. Pendekatan ini kurang memperhatikan konteks sosial, kapasitas masyarakat, serta relasi kelembagaan yang membentuk pilihan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Kritik terhadap pendekatan normatif tersebut diperkuat oleh penelitian Shize Zhang (2025) serta Liu et al. (2025). Zhang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tidak selalu mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat, melainkan dapat merupakan pilihan rasional yang dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan masyarakat. Sementara itu, Liu et al. mengungkap paradoks partisipasi, di mana tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan keberlanjutan pariwisata. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan tingkat atau intensitas, tetapi harus dilihat dalam konteks arena, aktor, dan struktur relasi yang melingkupinya.

Penelitian Wang et al. (2021) menambahkan perspektif bahwa partisipasi masyarakat memiliki implikasi sosial yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan konflik dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. Lemahnya partisipasi pada arena tertentu, khususnya pengambilan keputusan, dapat memicu konflik dan menurunkan dukungan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini masih menempatkan partisipasi sebagai variabel hubungan, bukan sebagai proses yang dianalisis secara mendalam pada setiap tahapan pembangunan.

Penelitian dalam konteks lingkungan dan kebencanaan, seperti yang dilakukan oleh Arif Hermanto dan Febri Yuliani serta Joko Pramono dan Joko Suranto, meskipun berada di luar sektor pariwisata, memberikan pelajaran penting bahwa partisipasi masyarakat hanya efektif ketika didukung oleh kapasitas, motivasi, serta ruang partisipasi yang jelas. Tanpa kejelasan arena dan peran, partisipasi cenderung bersifat sementara dan bergantung pada mobilisasi eksternal.

Berdasarkan sintesis kritis terhadap penelitian diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama penelitian terdahulu terletak pada kecenderungan melihat partisipasi masyarakat secara normatif dan statis, baik melalui pengukuran tingkat partisipasi maupun tipologi ideal. Masih terbatas penelitian yang secara empiris mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung dalam arena-arena konkret pembangunan, khususnya dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada arena partisipasi masyarakat meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dengan menggunakan kerangka Cohen dan Uphoff (1980), sehingga partisipasi dipahami sebagai proses sosial yang kontekstual, bukan sekadar capaian normatif.

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan gabungan dari dua istilah, yakni “administrasi” dan “publik”. Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas kata “ad” yang berarti intensif dan “ministrare” yang artinya melayani. Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan pelayanan secara intensif. Sementara itu, istilah “publik” merujuk pada sesuatu yang bersifat

umum, berkaitan dengan negara, masyarakat. Menurut Jefkins (2004) dalam Melawat (2022), publik didefinisikan sebagai kelompok individu yang menjalin komunikasi dengan suatu organisasi, baik dari dalam maupun luar organisasi. Sementara itu, Ruslan (1997) dalam Melawat (2022) mengemukakan bahwa istilah publik memiliki arti yang lebih terbatas dan khusus, yaitu sekelompok orang yang memiliki ikatan solidaritas.

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014), Administrasi Publik adalah proses mengatur dan mengoordinasikan sumber daya serta pegawai publik untuk merancang, menjalankan, dan mengelola keputusan yang ada dalam kebijakan publik. Kedua penulis juga menyebutkan bahwa administrasi publik adalah gabungan seni dan ilmu yang bertujuan mengelola urusan masyarakat serta melaksanakan tugas yang telah diberikan. Sebagai ilmu, administrasi publik bertujuan menyelesaikan masalah masyarakat dengan cara memperbaiki atau meningkatkan sistem, terutama dalam aspek organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik menurut (Pasolong 2007 dalam Widanti, 2022) dapat diartikan sebagai bentuk kolaborasi antara individu maupun lembaga dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Nicholas Henry dalam Keban (2014) menyatakan bahwa administrasi publik adalah kombinasi teori dan praktik yang kompleks. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat, serta membuat kebijakan publik lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Administrasi publik juga bertujuan mengatur manajemen secara lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang beragam.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Dalam ilmu administrasi publik, perubahan paradigma ini telah terjadi beberapa kali, sebagaimana dijelaskan oleh Nicholas Henry (1995) dalam Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, (2020)

1. Paradigma 1 (1900-1926): Dikotomi Politik dan Administrasi

Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa pemisahan antara ranah politik dan fungsi administrasi pemerintahan merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangan Woodrow Wilson dalam esainya berjudul *The Study of Administration*, terdapat empat prinsip utama yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya administrasi publik yaitu pemisahan antara ranah politik dan administrasi, analisis komparatif antara organisasi sektor publik dan swasta, peningkatan efisiensi melalui penerapan prinsip manajerial seperti dalam dunia bisnis, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui manajemen aparatur, pelatihan, dan penilaian kinerja berbasis prestasi.

2. Paradigma 2 (1927-1937): Prinsip-Prinsip Administrasi

Paradigma kedua berfokus pada prinsip-prinsip dasar dalam administrasi. Paradigma ini dimulai dengan terbitnya buku *Principles of Public Administration* oleh W. F. Willoughby pada tahun 1927. Kontribusi paling berpengaruh berasal dari Luther H. Gulick dan Lyndall F. Urwick melalui

Papers on the Science of Administration (1937), yang merumuskan tujuh prinsip administrasi yang dikenal dengan POSDCORB (planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting). Paradigma ini menekankan bahwa prinsip administrasi bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk organisasi serta dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

3. Paradigma 3 (1950-1970): Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Paradigma ketiga menggambarkan bahwa administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam pandangan Henry, pada masa itu muncul dorongan kuat dari para ilmuwan politik untuk menarik kembali administrasi publik ke dalam ranah ilmu politik. Di sisi lain, ilmuwan manajemen juga berusaha mengaitkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ini mencerminkan usaha untuk membangun kembali hubungan antara administrasi publik dengan disiplin asalnya yaitu ilmu politik sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan keilmuan yang terjadi saat itu.

4. Paradigma 4 (1956-1970): Administrasi Publik sebagai Manajemen

Paradigma keempat yang disebut oleh Henry adalah *Public Administration as Management*, yang memandang administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Pada masa ini, para ilmuwan manajemen berhasil menguatkan posisi mereka dengan memasukkan administrasi publik ke dalam ranah manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat, terlihat adanya persaingan antara dua disiplin ilmu politik dan manajemen yang

memiliki keinginan mengakui administrasi publik sebagai bagian dari keilmuan mereka.

5. Paradigma 5 (1970-sekarang): Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Tahap *Public Administration as Public Administration* dikenal sebagai era *New Public Management* (NPM). Pada fase ini, administrasi publik ditegaskan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Fokus utamanya bergeser dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. Henry menyebut fase ini sebagai tahap paling nyata dalam evolusi administrasi publik. Meski begitu, NPM juga menghadapi tantangan terutama terkait ketidakefisienan akibat penggabungan teori ekonomi dengan praktik manajemen swasta. Inti dari paradigma NPM adalah penggunaan pendekatan sektor swasta dalam pengelolaan sektor publik. Perubahan ini melahirkan konsep baru dalam hubungan pemerintahan, yang kemudian dikenal sebagai “*governance*”.

6. Paradigma 6 (1990-sekarang): Tata Kelola (*Governance*)

Paradigma terakhir dalam administrasi publik adalah *governance*. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kekuasaan oleh aktor politik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui proses yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor dalam menetapkan serta menyebarluaskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). Berbeda dengan model pemerintahan tradisional, *governance* menggambarkan proses

pemerintahan modern yang lebih partisipatif, di mana warga negara dan kelompok masyarakat turut serta dalam pengambilan keputusan publik yang strategis (Ikeanyibe, 2016). Dalam kerangka ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia layanan, melainkan berperan sebagai pengarah, sementara pelaksanaannya dapat dilakukan oleh sektor swasta, organisasi nirlaba, maupun level pemerintahan lainnya (Ewalt, 2001). Secara prinsip, *governance* menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor baik pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun komunitas lokal dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara kolaboratif (Gibson, 2011).

Berdasarkan paradigma yang telah diuraikan, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *governance*, karena fokus utamanya adalah pada arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak. Paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya dalam arena perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Paradigma ini relevan karena menggambarkan bagaimana masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata secara partisipatif dan berkelanjutan.

1.6.4. Manajemen Publik

Manajemen menurut R. Terry dalam Hari Sucahyowati (2017) adalah sebuah proses khusus yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia serta sumber daya

lainnya. Menurut Shafritz dan Russel (1997:20) dalam Keban (2014), manajemen tidak hanya berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga melibatkan sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam mengelola organisasi melalui pemanfaatan berbagai sumber daya seperti manusia dan mesin.

Menurut Overman sebagaimana dikutip oleh Ott, Hyde, dan Shafritz (1991: xi), manajemen publik tidak dapat disamakan dengan ilmu manajemen, walaupun memiliki pengaruh kuat dari pendekatan tersebut. Manajemen publik mencerminkan adanya ketegangan antara orientasi rasional-instrumental di satu sisi dan orientasi politik di sisi lainnya. Pada dasarnya, manajemen publik merupakan kajian interdisipliner mengenai aspek-aspek umum organisasi yang menggabungkan fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan dinamika politik (Keban, 2014).

Pasolong (2007:83) dalam Satibi (2023), secara sederhana menjelaskan bahwa manajemen publik dapat diartikan sebagai “manajemen instansi pemerintah”. Pada dasarnya inti manajemen publik yaitu tentang bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengelola sebuah lembaga pemerintah secara efektif. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wilson dalam Pasolong (2007:96) menyampaikan bahwa terdapat empat prinsip dasar yang membentuk perkembangan manajemen publik yaitu 1) pemerintahan dipandang sebagai lingkungan utama tempat organisasi beroperasi, 2) peran eksekutif menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan administrasi, 3) pentingnya menemukan prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang efektif sebagai landasan untuk meningkatkan kompetensi

administrasi, dan 4) penggunaan metode perbandingan dianggap sebagai pendekatan penting dalam mengembangkan studi administrasi publik.

Berdasarkan pandangan dari beberapa ahli, manajemen publik dapat diartikan sebagai proses pengelolaan sektor publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya. Proses ini bertujuan untuk mengatur alokasi sumber daya, mengawasi jalannya kegiatan, dan menetapkan kebijakan yang tepat untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran.

1.6.5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Heller (1995) dalam Sutomo (2023) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses di mana individu terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lembaga, program, atau lingkungan yang memiliki dampak terhadap kehidupannya. Sejalan dengan pendapat Hoof Steede dalam (Suaib, 2023), partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang dalam satu atau lebih tahapan dalam proses pembangunan yang sedang berjalan. Sedangkan dalam pandangan Santoso Sastropoetro (1988) dalam Sawir, (2021), partisipasi dapat dijelaskan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela yang muncul dari kesadaran pribadi dan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk bersama-sama mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988, Engka et al., 2015), partisipasi dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. partisipasi dalam bentuk ide atau gagasan;
2. partisipasi melalui keterampilan atau keahlian;

3. partisipasi dengan menyumbangkan tenaga;
4. partisipasi dalam bentuk barang atau materi; dan
5. partisipasi berupa kontribusi finansial.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980) dalam artikel yang berjudul “*Participation's Place In Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*” terdapat empat arena partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Participation in Decision Making*)

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan tahap dasar dalam proses pembangunan yang demokratis dan inklusif. Dalam tahap ini, masyarakat tidak sekedar menjadi penerima manfaat, melainkan turut andil dalam menentukan arah dan isi dari program pembangunan. Tahap ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam memilih alternatif yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui sumbangan pemikiran, partisipasi dalam rapat atau musyawarah, serta penyampaian persetujuan maupun penolakan terhadap program yang diusulkan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan (*Participation in Implementation*)

Partisipasi dalam pelaksanaan mengacu pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam operasionalisasi program pembangunan. Bentuk partisipasi ini dapat berupa kontribusi sumber daya (tenaga kerja, dana, informasi), pelibatan dalam struktur administrasi dan koordinasi kegiatan, dan keikutsertaan dalam berbagai program kegiatan. Cohen dan Uphoff

menekankan pentingnya mengkaji sifat partisipasi tersebut bersifat sukarela, remuneratif, atau koersif, dan sejauh mana partisipasi terjadi secara individu atau kolektif. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan bentuk konkrit dari keterlibatan masyarakat yang menunjukkan komitmen mereka terhadap keberhasilan program.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat (*Participation in Benefits*)

Partisipasi dalam manfaat berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memperoleh hasil dari suatu program pembangunan dalam bentuk manfaat material, sosial, maupun personal. Manfaat material dapat berupa peningkatan pendapatan, konsumsi, dan aset. Manfaat sosial meliputi penyediaan layanan publik dan manfaat personal lebih bersifat psikologis dan sosial-politik, seperti peningkatan rasa percaya diri, kapasitas pengambilan keputusan, dan pengaruh dalam komunitas. Tahap ini sangat penting untuk mengukur keadilan distribusi manfaat dan menganalisis perolehan keuntungan dan siapa yang memperoleh dampak keberadaan proyek.

4. Partisipasi dalam Evaluasi (*Participation in Evaluation*)

Partisipasi dalam evaluasi adalah bentuk keterlibatan yang memungkinkan masyarakat menilai keberhasilan, kegagalan, dan dampak dari proyek pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung melalui forum evaluasi formal atau secara tidak langsung melalui konstitusi, jalur politik, maupun opini publik. Dalam tahap ini, Cohen dan Uphoff menekankan pentingnya evaluasi sebagai alat umpan balik (kritik dan saran)

yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kontrol sosial terhadap jalannya proyek, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Cohen & Uphoff, 1980).

Partisipasi masyarakat menurut Oakley (1991) dalam (Dirawan, 2024), mengidentifikasi tiga konsep utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam bentuk ide, dana, tenaga, maupun fasilitas untuk mendukung pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang diinisiasi oleh pihak tertentu.

2. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat merupakan proses penyusunan struktur atau pembagian peran dan tanggung jawab dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, potensi sumber daya yang tersedia, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan mengacu pada proses penguatan kapasitas masyarakat, baik dari segi keterampilan maupun daya kendali agar mereka mampu mengatasi persoalan yang dihadapi secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat meliputi peran, aksi nyata, motivasi, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan kebersihan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan kerangka partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) dalam jurnalnya yang berjudul “Participation's Place in

Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity.” Teori ini membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat arena utama, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat arena ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

1.6.6. Faktor-Faktor yang Berkontribusi dalam Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan suatu program atau keputusan yang telah dirancang dan ditetapkan dengan cermat merupakan praktik yang umum dijumpai dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari. Kebijakan maupun aktivitas yang telah melalui tahapan prosedural diharapkan mampu mencapai sasaran sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan. Dalam proses implementasinya, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting yang menyertai, guna memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung secara optimal dan efektif.

Slamet (2003) dalam Nurbaiti & Bambang (2017) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan terealisasi secara konkret apabila terdapat sejumlah faktor pendukung yang memadai. Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi:

1. Kesempatan, yakni kondisi atau situasi lingkungan yang memberikan kesadaran kepada individu bahwa orang tersebut memiliki kemungkinan untuk turut berpartisipasi

2. Kemauan, yaitu rangsangan internal yang menumbuhkan minat serta sikap positif terhadap keterlibatan dalam pembangunan, yang dapat muncul melalui persepsi terhadap manfaat langsung dari partisipasi tersebut
3. Kemampuan, yaitu kesadaran dan keyakinan individu bahwa dirinya memiliki bekal untuk berpartisipasi, baik berupa pemikiran, tenaga, waktu, maupun sumber daya lainnya.

Deviyanti (2013) dalam Irfani & Satlita (2024), menjelaskan bahwa terdapat faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sikap dan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Secara umum, masyarakat pada usia produktif memiliki antusiasme tinggi terhadap pembangunan.

2. Jenis Kelamin

Secara historis, perempuan sering kali dibatasi pada peran domestik, seperti mengurus rumah tangga. Pandangan ini masih melekat dalam sebagian masyarakat dan dapat menghambat partisipasi perempuan di ruang publik.

3. Mata Pencarian

Jenis pekerjaan seseorang turut memengaruhi kemampuannya untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Masyarakat dengan pekerjaan yang menyita waktu atau memiliki jadwal yang tidak fleksibel cenderung kesulitan untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh latar belakang pekerjaan yang tidak berhubungan

dengan pembangunan (seperti petani, buruh, atau nelayan) juga menjadi kendala tersendiri.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran, kemampuan berpikir kritis, dan kemudahan dalam mengakses informasi. Mereka juga lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan keterbatasan dalam memahami manfaat pembangunan,

5. Campur Tangan Stakeholder

Partisipasi masyarakat bisa terganggu apabila terdapat dominasi atau intervensi yang terlalu besar dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah lokal atau organisasi tertentu. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara utuh dalam pengambilan keputusan, maka keterlibatan mereka bisa menjadi pasif atau sekadar formalitas.

Faktor internal menurut Imron (2005) dalam Hafizha et al., (2023), menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pengetahuan dan Keahlian

Tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki individu dalam masyarakat turut menentukan sejauh mana mereka dapat berpartisipasi secara efektif. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, maka semakin besar pula

kemungkinan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan.

2. Keinginan dalam Diri Masyarakat

Dorongan internal berupa rasa sukarela dan kemauan pribadi sangat berperan dalam menentukan partisipasi seseorang. Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan.

3. Mata Pencarian

Ragam pekerjaan yang dimiliki masyarakat membawa pengaruh terhadap tingkat partisipasi, terutama karena perbedaan dalam keterampilan, beban kerja, dan waktu luang yang tersedia.

4. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan cara bertindak seseorang. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap partisipasi, karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterlibatan dalam kegiatan.

5. Jenis kelamin

Perbedaan gender turut memengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi. Laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan serta keahlian yang berbeda sesuai dengan peran sosial yang dilekatkan pada masing-masing, sehingga peran mereka dalam partisipasi masyarakat dapat bervariasi sesuai konteksnya.

Faktor eksternal menurut Imron (2005) dalam Hafizha et al., (2023) antara lain:

1. Stakeholder

Keberadaan stakeholder memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk dalam mendorong partisipasi masyarakat di suatu wilayah. Hal ini karena stakeholder merupakan kelompok yang memiliki otoritas lebih besar dalam proses kegiatan serta berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dan penyedia sumber daya manusia yang mendukung keberlangsungan program.

2. Media Massa

Media massa berperan sebagai sarana utama penyebaran informasi dan komunikasi antarindividu maupun kelompok. Kehadirannya dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat serta membentuk opini publik terhadap suatu kegiatan yang berlangsung.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan teori faktor internal menurut Imron (2005) dalam Hafizha et al. (2023), yang mencakup lima indikator: pengetahuan dan keahlian, keinginan dalam diri masyarakat, mata pencarian, pendidikan, dan jenis kelamin. Selain itu, faktor eksternal menurut Imron (2005) dalam Hafizha et al. (2023), yang terdiri atas dua indikator, yaitu stakeholder dan media massa.

1.6.7. Pariwisata

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata *pari* dan *wisata*. Kata *pari* memiliki makna berkeliling atau

berulang kali, sedangkan wisata berarti pergi atau melakukan perjalanan. Berdasarkan pengertian tersebut, pariwisata dapat dimaknai sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain secara berulang atau berkeliling, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tour*. Adapun istilah kepariwisataan digunakan untuk merujuk pada pengertian yang lebih luas dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *tourism* (Akib et al., 2022).

Menurut Wahab (2004), pariwisata merupakan sektor industri yang berkembang pesat dan memiliki kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan taraf hidup, serta penggerak bagi sektor-sektor produktif lainnya. Menurut Soekadijo (2011), pariwisata mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata serta berbagai usaha pendukung yang berhubungan dengan bidang tersebut. Sementara itu, kepariwisataan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

Menurut Wirawan & Semara (2021), kegiatan wisata dapat dipahami sebagai suatu proses konsumsi terhadap produk wisata yang dilakukan oleh wisatawan sejak keberangkatan dari tempat tinggal, selama perjalanan, hingga berada di daerah tujuan wisata. Produk wisata yang dikonsumsi tersebut tidak hanya berupa barang atau jasa, melainkan merupakan pengalaman secara menyeluruh yang dirasakan oleh wisatawan selama proses perjalanan wisata. Pengalaman berwisata tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Pengalaman eksplisit merupakan pengalaman yang diperoleh wisatawan melalui pancaindra, seperti apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan, dan dialami secara fisik selama kegiatan wisata.
- b. Pengalaman implisit adalah pengalaman yang berkaitan dengan aspek psikologis wisatawan, meliputi proses berpikir atau kognitif, perasaan atau afektif, serta kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku sebagai hasil dari interaksi antara proses kognitif dan afektif tersebut.

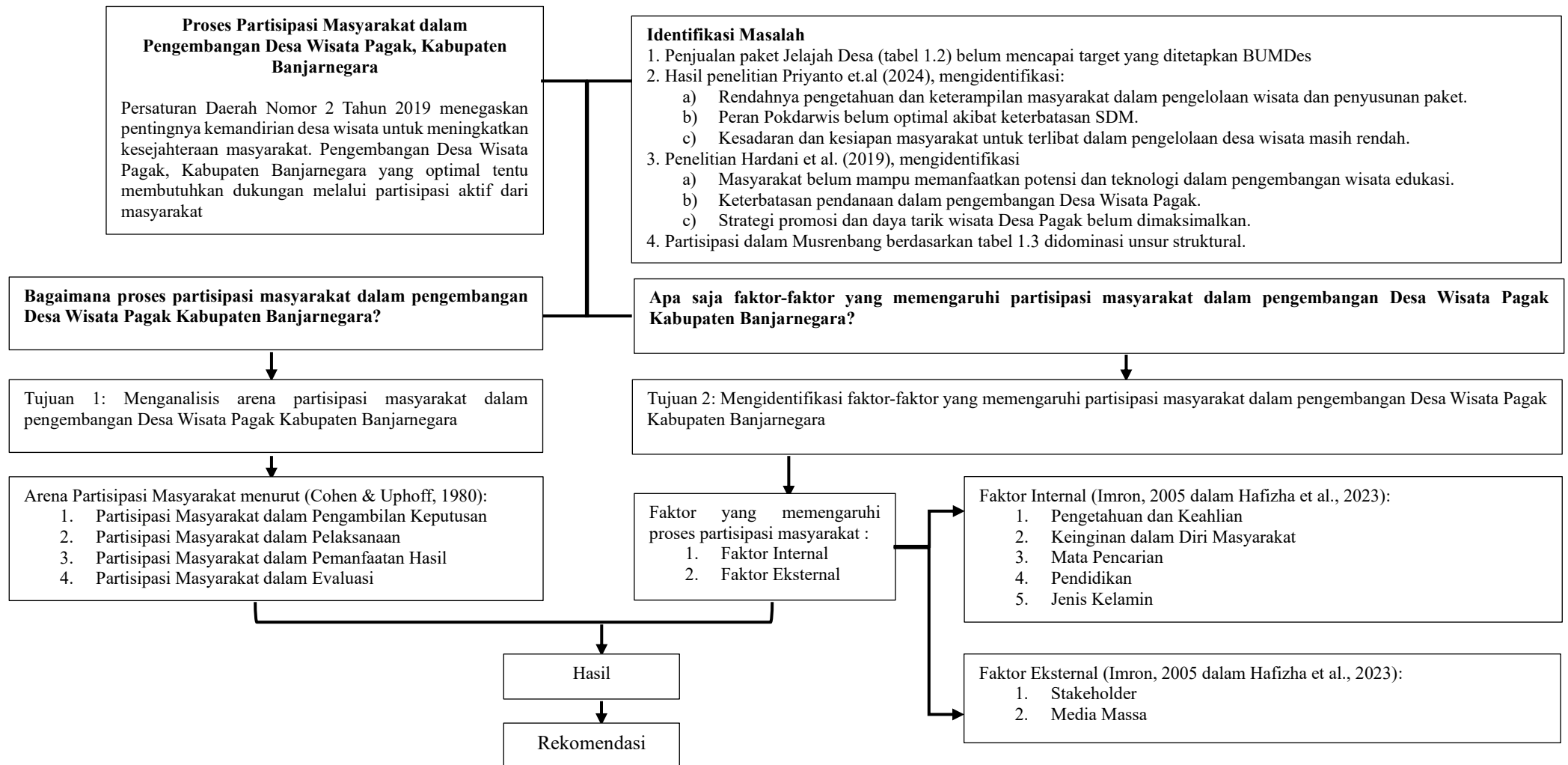
1.6.8. Desa Wisata

Desa wisata dalam kerangka wisata pedesaan merupakan aset kepariwisataan yang bertumpu pada potensi desa, termasuk keunikan serta daya tarik yang dimilikinya, yang dapat dioptimalkan dan dikembangkan menjadi produk wisata guna mendorong kunjungan wisatawan ke desa tersebut (Sudibya, 2018). Desa wisata merupakan wujud integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, serta berbagai fasilitas pendukung yang berada dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang menyatu dengan norma, adat istiadat, dan tradisi lokal yang berlaku (Nuryanti, 1993 dalam Adio et al., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010, desa wisata dimaknai sebagai bentuk integrasi antara atraksi wisata, akomodasi, dan berbagai fasilitas pendukung yang diselenggarakan dalam tatanan kehidupan masyarakat serta menyatu dengan norma, tata cara, dan tradisi lokal yang berlaku. Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengelompokkan desa wisata ke dalam empat klasifikasi, yaitu:

- a. Desa Wisata Rintisan, yaitu desa yang masih berada pada tahap awal pengembangan dengan potensi wisata yang belum diolah menjadi produk wisata siap konsumsi. Pada tahap ini, kunjungan wisatawan belum terbentuk, sarana dan prasarana masih terbatas, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata masih rendah.
- b. Desa Wisata Berkembang, merupakan desa yang telah mulai diarahkan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang lebih maju. Meskipun masih berbasis potensi, desa ini sudah mampu menerima kunjungan wisatawan dan berada dalam proses transisi menuju pengelolaan desa wisata yang lebih optimal.
- c. Desa Wisata Maju, ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha pariwisata secara mandiri. Pada tahap ini, pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi pariwisata sudah dilakukan, serta jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, telah mengalami peningkatan.
- d. Desa Wisata Mandiri, yaitu desa yang telah menunjukkan inovasi pariwisata berbasis masyarakat, dengan destinasi yang telah memperoleh pengakuan luas. Pengelolaan pariwisata didukung oleh sarana dan prasarana yang terstandarisasi serta dilaksanakan secara kolaboratif melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan .

1.6.9. Kerangka Pikir



1.7. Definisi Operasional

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini merujuk pada proses perumusan secara terstruktur dan rinci mengenai bagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti akan digunakan dan diukur untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam arena pengembangan desa wisata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi arena partisipasi. Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat melalui pengamatan terhadap empat arena partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1980), yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam arena ini merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan ide dan memberikan tanggapan, ikut serta dalam rapat atau musyawarah, dan pembentukan program kegiatan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam arena ini merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dalam bentuk kontribusi tenaga, waktu, dana, dan informasi, pelibatan dalam struktur administrasi, dan keikutsertaan dalam berbagai program kegiatan

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam arena ini merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil berupa manfaat material, sosial, atau personal.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam arena ini merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil program pembangunan dalam bentuk evaluasi dan umpan balik berupa kritik dan saran dari masyarakat.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap arena partisipasi masyarakat dianalisis berdasarkan indikasi atau tanda-tanda yang terlihat nyata di lapangan, yaitu:

1. Faktor Internal sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Imron, 2005 dalam Hafizha et al., 2023), gejala yang diamati yaitu pengetahuan dan keahlian, keinginan dalam diri masyarakat, mata pencarian, pendidikan, dan jenis kelamin.
2. Faktor eksternal sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Imron, 2005 dalam Hafizha et al., 2023), gejala yang diamati yaitu stakeholder dan media massa.

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Arena Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pagak Kabupaten Banjarnegara	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	1. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan.
			2. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan.
			3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rapat atau musyawarah desa
			4. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan program kegiatan.
		Partisipasi dalam Pelaksanaan	5. Kontribusi masyarakat dalam bentuk dana, tenaga, dan informasi.
			6. Keterlibatan masyarakat dalam struktur administrasi atau kepanitian dalam pelaksanaan program kegiatan desa wisata.

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
			7. Keterlibatan masyarakat dalam program kegiatan pengembangan desa wisata
		Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat	8. Manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat
			9. Manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat
			10. Manfaat personal yang diterima oleh masyarakat
		Partisipasi dalam Evaluasi	11. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dengan menilai keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan dampak program kegiatan.
			12. Kesempatan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran.
2.	Faktor internal dan eksternal partisipasi masyarakat	Faktor Internal	13. Pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
			14. Keinginan dari masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata
			15. Mata pencarian masyarakat Desa Pagak
			16. Tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Pagak
			17. Perbedaan peran dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin
		Faktor Eksternal	18. Keterlibatan pihak-pihak tertentu yang menentukan arah kegiatan
			19. Keterbukaan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai program pengembangan desa wisata.

Tabel 1. 4 Fenomena Penelitian

Sumber: diolah peneliti, 2025

1.8. Argumen Penelitian

Desa Wisata Pagak merupakan salah satu desa wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Keputusan Bupati Nomor 556/111/2022 sebagai upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Desa ini memiliki berbagai potensi wisata yang mencakup aspek alam, budaya, kuliner, serta ekonomi kreatif masyarakat lokal. Keberagaman daya tarik tersebut telah mendorong Desa Pagak meraih prestasi sebagai Juara 1 dalam ajang Gelar Desa Wisata Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Capaian tersebut menunjukkan adanya pengakuan atas kekayaan potensi dan pengelolaan pariwisata yang dimiliki.

Partisipasi masyarakat dalam forum-forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga masih menunjukkan kecenderungan simbolik. Keterlibatan masyarakat umum dalam forum tersebut tergolong rendah, dengan dominasi dari unsur struktural dan rendahnya partisipasi kelompok perempuan serta usia produktif. Padahal, secara demografis, Desa Pagak didominasi oleh penduduk usia produktif yang semestinya menjadi modal sosial penting dalam pengembangan desa wisata secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kondisi ini menjadi relevan untuk diteliti karena menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal terhadap keberhasilan desa wisata dan kenyataan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Meskipun secara administratif desa telah menunjukkan kemajuan, keberlanjutan pengembangan desa wisata tetap sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji secara mendalam arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak melalui empat arena partisipasi yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap arena partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mengkaji permasalahan secara menyeluruh dan mendalam untuk memperoleh informasi terkait arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Pagak Kabupaten Banjarnegara.

1.9.2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Desa Pagak sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Desa Pagak didasarkan pada keberadaan Desa Wisata Pagak sebelumnya meraih prestasi sebagai Juara 1 dalam ajang Gelar Desa Wisata, yang menunjukkan bahwa Desa Pagak memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi desa wisata yang maju dan berdaya saing. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata tersebut masih belum optimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, situs penelitian merujuk pada lokasi tempat dilakukannya pengumpulan data

dan informasi yang relevan dengan objek kajian. Oleh karena itu, peneliti menetapkan Desa Pagak sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan atas keberadaan Desa Wisata Pagak yang memiliki potensi, namun menghadapi kendala dalam hal partisipasi masyarakat.

1.9.3. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini disesuaikan dengan topik yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel sumber data yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dalam isu terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara. Beberapa informan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Informan Penelitian	Alasan Keterkaitan Informan dengan Fenomena	Jumlah Informan
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	- Merancang kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi wisata	1
		- Memberikan dukungan, pembinaan, dan pengembangan desa wisata	
2.	Kepala Desa Pagak	- Memfasilitasi dan mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.	1
		- Memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan	
		- Sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengembangan desa wisata	

No.	Informan Penelitian	Alasan Keterkaitan Informan dengan Fenomena	Jumlah Informan
3.	Ketua BUMDes Desa Pagak	- Bertanggung jawab dalam pengelolaan unit usaha desa wisata	1
		- Menciptakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi berdasarkan potensi lokal	
4.	Pokdarwis Desa Pagak	- Pelaku utama dalam kegiatan pengembangan dan promosi desa wisata.	1
		- Penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi	
		- Sebagai kelompok yang mengetahui hambatan, peluang, dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata	
5.	Pemuda Desa Pagak	- Mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial	1
		- Menciptakan inovasi dan kreativitas yang menunjang pengembangan daya tarik wisata	
6.	Masyarakat Desa Pagak (Pelaku UMKM dan Masyarakat Terdampak)	- Sebagai pelaku dan penerima manfaat dari wisata desa	3
		- Terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata	
		- Memberikan persepsi dan sikap terhadap pengembangan desa wisata	
Total			8

Tabel 1. 5 Informan Penelitian

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Ibrahim (2018), tujuan utama dari pendekatan kualitatif adalah untuk menggali makna dan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang sedang

diteliti. Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi dan pernyataan dari hasil wawancara dengan informan terkait arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Pagak Kabupaten Banjarnegara, disertai dengan temuan dari observasi lapangan yang telah dianalisis. Data yang dihimpun mencakup transkrip wawancara, dokumentasi, serta dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat aspek dalam penelitian.

1.9.5. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua jenis sumber data (Mustafa 2019), yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Jenis data ini bersifat data asli atau data *up to date*. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Kepala Desa Pagak, Ketua Bumdes Desa Pagak, Pokdarwis Desa Pagak, Karang Taruna Desa Pagak, dan Masyarakat Desa Pagak, terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara dan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Wisata Pagak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber data ini dapat meliputi publikasi resmi seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS),

buku referensi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen tertulis lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan dokumen pendukung lainnya seperti RPJMDes Desa Pagak, Laporan Kinerja BUMDes, Website Sidesa Provinsi Jawa Tengah, BPS, dan Laporan Pemerintah Desa Pagak.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Abubakar (2021) adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Melalui wawancara, diperoleh data terkait arena partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Pagak Kabupaten Banjarnegara. Pihak-pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Kepala Desa Pagak, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagak, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pagak, Pemuda Desa Pagak, serta masyarakat Desa Pagak yang terdiri atas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat yang terdampak langsung dari pengembangan desa wisata

2. Observasi

Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi non-partisipan karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati dan hanya berperan sebagai pengamat. di lingkungan Desa Pagak, termasuk didalamnya Desa Wisata Pagak. Kegiatan yang diobservasi meliputi musyawarah warga, pelaksanaan program wisata, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha wisata, serta evaluasi atau diskusi terkait keberlanjutan program. Observasi difokuskan pada arena pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi atas program pengembangan desa wisata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini menggunakan transkrip wawancara, foto dengan informan, dan dokumen yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama arena pengumpulan data berlangsung dan setelah data terkumpul dalam kurun waktu tertentu (Sugiyono, 2023). Analisis data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kata kunci yang diperoleh dari hasil operasionalisasi konsep, yang ditinjau melalui proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, baik dari aspek internal seperti pengetahuan dan

keahlian, keinginan dalam diri masyarakat, mata pencarian, pendidikan, dan jenis kelamin, maupun aspek eksternal seperti stakeholder dan media massa.

2. ATLAS.ti

Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak ATLAS.ti versi 23 sebagai alat bantu dalam arena analisis data kualitatif. ATLAS.ti merupakan *software* yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang berasal dari berbagai jenis sumber, seperti teks, gambar, audio, atau video (Warsono et al., 2022). Penggunaan perangkat lunak ini bertujuan untuk mempermudah proses pengkodean, pengelompokan kategori, serta penarikan tema berdasarkan hasil wawancara yang telah dikumpulkan, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (Sugiyono, 2023). Penyajian data dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak untuk mengidentifikasi komponen yang relevan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan yang diteliti.

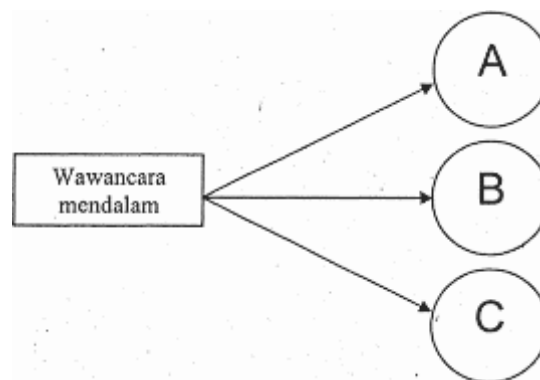
4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah diperoleh, serta mengidentifikasi hubungan kesamaan maupun perbedaan antara data yang ditemukan dengan kondisi nyata yang terjadi di Desa Wisata Pagak, Kabupaten Banjarnegara.

1.9.8. Kualitas Data

Salah satu tahapan akhir dalam proses penelitian untuk memastikan kebenaran data adalah dengan menilai kualitas data yang dapat diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas diartikan sebagai proses memeriksa data yang diperoleh dengan membandingkannya dari berbagai sumber, menggunakan beragam metode, dan dilakukan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2023). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu sumber, waktu, dan teknik.

Pada penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi dengan cara menghimpun data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Gambar 1. 1 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

Sumber: Sugiyono, 2023

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan informan yang memiliki peran dan sudut pandang berbeda terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak, yaitu:

A. Pemerintah Tingkat Atas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara memiliki peran dalam memberikan perspektif dari sisi regulasi, kebijakan strategis, dan

dukungan fasilitasi. Informasi dari pemerintah digunakan untuk memahami bagaimana program pengembangan desa wisata dirancang dan diarahkan.

B. Pelaksana di Tingkat Desa Pagak

Pelaksana di tingkat desa merupakan implementor kebijakan yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Informasi dari pelaksana tingkat Desa Pagak dapat memberikan data lapangan terkait pelaksanaan program dan koordinasi partisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Pagak.

C. Masyarakat Desa Pagak

Masyarakat Desa Pagak meliputi masyarakat terdampak atau masyarakat yang menjadi pelaku UMKM. Informasi dari masyarakat Desa Pagak dapat memberikan informasi dari penerima dampak langsung dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Pagak.

Dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pagak, proses verifikasi informasi dari berbagai sumber sangat penting agar temuan yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan informan yang beragam untuk memperoleh data yang mempresentasikan berbagai perspektif. Peneliti memadukan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai upaya untuk memastikan mutu serta kredibilitas data yang dikumpulkan.